

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

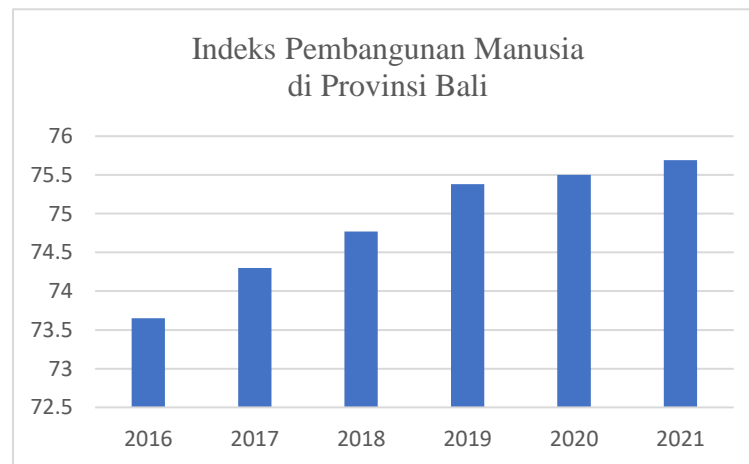
### **1.1 Latar Belakang**

Setiap daerah pastinya memiliki berbagai macam cara untuk melakukan sebuah Pembangunan ekonomi supaya sebuah daerah dapat menjadi lebih baik lagi kedepannya. Pada dasarnya pembangunan merupakan sebuah proses perubahan yang berjalan terus menerus untuk menuju ke arah yang lebih baik kedepannya, secara material maupun spiritual. Pembangunan harusnya dilihat sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, serta institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan mengentaskan tingkat kemiskinan (Todaro dan smith, 2006). Perkembangan paradigma pembangunan juga tidak hanya dilihat melalui pertumbuhan ekonominya. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur pembangunan suatu negara, salah satunya dengan melihat tingkat pembangunan manusia termasuk didalamnya terdapat kualitas hidup manusia di suatu daerah atau negara tersebut (Kahang et al., 2006). Salah satu indikator yang dapat dilihat untuk mengukur tingkat kualitas manusia dan skala ekonomi yaitu dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di suatu daerah atau negara tertentu (Parasetyoningrum, 2018).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. (BPS, 2023)

Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang terkenal sebagai provinsi pariwisata dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali. Provinsi Bali merupakan Provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat Indeks Pembangunan Manusia yang baik. Saat pandemi covid yang melanda hampir di seluruh dunia menjadikan beberapa negara mengalami penurunan dari segi perekonomiannya, tetapi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali tidak mengalami penurunan saat pandemi covid tingkat pemabangunan manusia di Provinsi Bali terus meningkat. Hal ini dapat dikatakan meskipun saat pandemi covid tidak membuat turunnya Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.

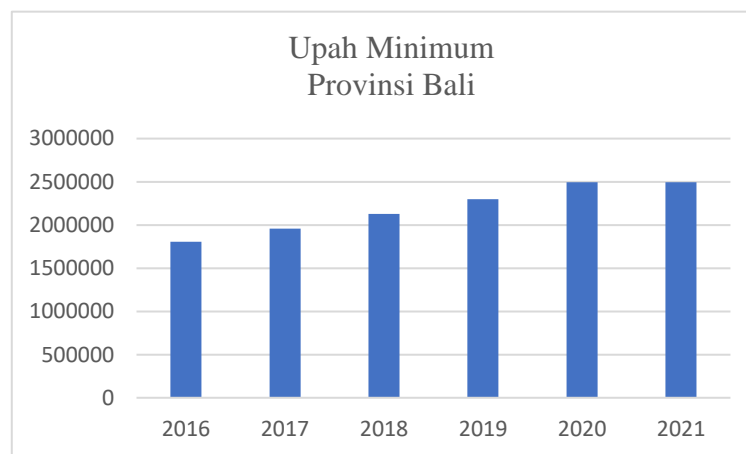
Terdapat beberapa indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kualitas keberhasilan suatu pembangunan manusia di suatu daerah atau negara. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) awal mula diperkenalkan oleh United Nations Development Programw (UNDP) pada tahun 1990. Beberapa komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) seperti standar hidup, Kesehatan, serta pendidikan yang layak (Amalia et al., 2019). Pada gambar 1.1, terlihat bahwa IPM di provinsi Bali mengalami kenaikan terus menerus dari tahun 2016-2021. Tetapi meskipun demikian Indeks Pembangunan di Provinsi Bali ini belum menjadi tingkat indeks pembangunan manusia tertinggi antar provinsi di Indonesia.



**Gambar 1.1. IPM Provinsi Bali**  
Sumber : BPS Provinsi Bali

Begitu juga dengan Upah minimum bagi masyarakat merupakan suatu sumber penghasilan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan hidup seseorang individu maupun yang telah berumah tangga. Apabila terdapat kenaikan pada upah minimum maka akan mempengaruhi kesejahteraan mereka. Sebaliknya, jika upah minimum menurun maka akan menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan

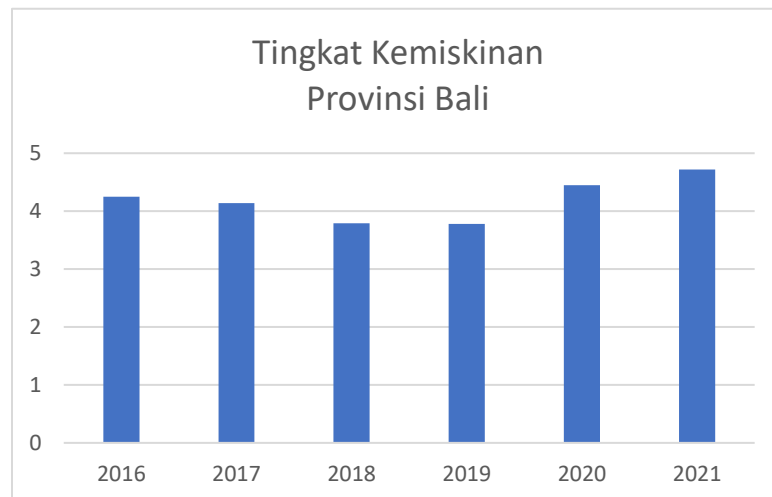
(Ningrum, 2017). Selain memberikan jaminan atas buruh kebijakan upah minimum juga diharapkan dapat menjadi media distribusi dalam mengatasi pemerataan pembangunan setiap daerah atau negara. Tetapi setelah dilihat dari data upah minimum provinsi Bali tahun 2012-2021 ternyata upah minimum di provinsi Bali juga cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya meskipun juga pernah menurun. Jika dilihat dari data BPS, Upah minimum di Provinsi Bali juga termasuk upah minimum yang tergolong rendah, penetapan UMP di Bali rendah karena melihat disparitas pertumbuhan ekonomi di Bali yang sangat jomplang antara dengan Kabupaten atau Kota lainnya (Disnaker, 2023). Hal ini dapat menyebabkan banyaknya masyarakat provinsi Bali yang belum bisa mencukupi kebutuhan hidupnya dengan upah minimum yang rendah juga dapat menyebabkan peningkatan kemiskinan yang ada di Provinsi Bali.



**Gambar 1.2. Upah minimum Provinsi Bali**  
Sumber : BPS Provinsi Bali

Tingkat kemiskinan sendiri dapat dikatakan sebagai suatu masalah atau merupakan persoalan pada setiap negara dan bahkan menjadi masalah yang nyaris

tidak ada ujungnya. Tingkat kemiskinan yang tinggi dapat menyebabkan turunnya taraf hidup masyarakat sehingga berdampak pada penurunan kebutuhan sehari-hari (Sartika et al., 2016). Kebijakan mengenai upah minimum kabupaten dan kota diharapkan nantinya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain memberikan jaminan atas penghasilan atas pekerjaan kaum buruh. Kebijakan upah minimum juga diharapkan mampu menjadi media distribusi pemerataan pembangunan pada tiap daerah. Pada gambar 1.3 dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan Provinsi Bali cenderung mengalami fluktuatif pada setiap tahunnya. Tingkat kemiskinan paling tinggi yaitu pada tahun 2021. Tingkat kemiskinan di Provinsi Bali ini dapat disebabkan akibat pengangguran yang cukup tinggi pula.



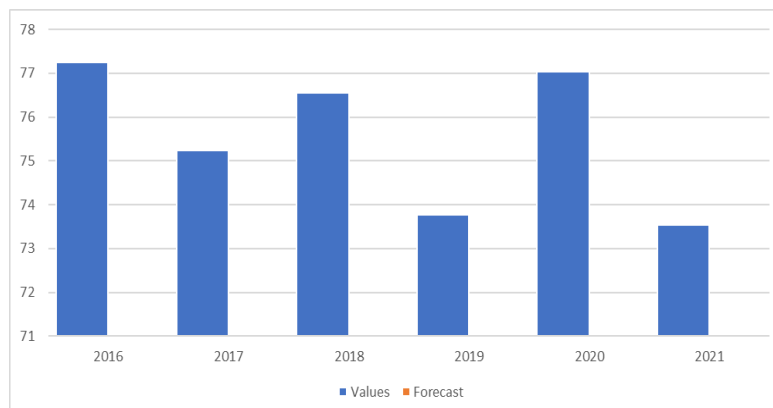
**Gambar 1.3. Tingkat kemiskinan Provinsi Bali**

Sumber : BPS Provinsi Bali

Secara singkat tingkat kemiskinan dapat diartikan sebagai tingkat taraf hidup yang tidak memenuhi standart hidup rata-rata masyarakat suatu wilayah atau negara, yaitu dengan adanya kekuarangan dari segi materi maupun non materi dalam pemenuhan kebutuhan hidup pada sejumlah orang atau Masyarakat dibandingkan

dengan standart umum yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Adanya standart hidup yang rendah akan dapat langsung mempengaruhi Kesehatan, kehidupan maupun kesejahteraan seseorang yang dikategorikan miskin atau sekelompok orang yang miskin (Suliswanto, 2010).

Tingkat kemiskinan terdapat kaitannya dengan pengangguran, kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengangguran yang tinggi mempunyai dampak buruk baik terhadap perekonomian, inidvidu dan masyarakat, seperti pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapai. Oleh karena itu Provinsi Bali juga tidak luput dari permasalahan pengangguran apalagi dengan adanya tragedi bom yang melanda Bali sebanyak dua kali, dimana memperparah kondisi ketenagakerjaan yang menyebabkan jumlah pengangguran di Bali terus meningkat akibat ketidakpercayaan investor untuk berinvestasi di Bali. Oleh karena itu dengan adanya tingkat pengangguran yang tinggi maka akan menurunkan kesejahteraan masyarakat yang ada di provinsi Bali



**Gambar 1.4 Tingkat Pengangguran Provinsi Bali**  
Sumber: BPS Provinsi Bali

Dapat dilihat dari table 1.4 di atas tingkat pengangguran di provinsi bali mengalami peningkatan paling tinggi pada tahun 2020 yaitu sebesar 4.42% dengan adanya hal ini akan dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di provinsi Bali. Berdasarkan latar belaknag diatas maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan di Provinsi Bali mengalami peningkatan terus menerus selama periode tahun 2012-2021, tetapi meskipun demikian Indeks Pembangunan di Provinsi Bali belum menjadi IPM tertinggi antar provinsi di Indonesia sedangkan upah minimum provinsi Bali tergolong upah minimum yang rendah menurut BPS, rendahnya upah minimum di Provinsi Bali ini dapat memicu adanya kemiskinan Masyarakat yang ada di Provinsi Bali karena kurangnya biaya hidup sehari hari tingkat kemiskinan di Provinsi Bali juga meningkat sejalan dengan pengangguran yang ada di Provinsi Bali Berdasarkan penelitian sebelumnya Moh. Faizin (2021), “Pengaruh Upah Minimum, Tingkat kemiskinan dan Pengangguran pada IPM di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum berpengaruh terhadap IPM, tingkat kemiskinan memiliki pengaruh terhadap IPM, dan pengangguran memiliki pengaruh terhadap IPM. Dari asumsi tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai **Analisis Pengaruh Upah Minmum, Tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan manusia di Provinsi Bali ?
2. Apakah Tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali ?
3. Apakah Tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap Indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Upah Minimum terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Tingkat Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.
3. Untuk mengetahui seberapa besar Tingkat Pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali.

## **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

1. Penelitian ini mencakup series data selama periode 10 tahun terakhir pada provinsi Bali
2. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu IPM sebagai variabel dependen dan upah minimum, garis tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran sebagai variable independen.



### **1.5 Manfaat penelitian**

Dengan penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis, dapat membantu mendapatkan gelar S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta menambah pengalaman dalam penulisan karya ilmiah yang baik.
2. Bagi masyarakat umum, sebagai alat untuk menambah wawasan mengenai pengaruh upah minimum, garis tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) di Provinsi Bali.
3. Pada instansi pemerintah, penulis berharap adanya penelitian ini dapat membantu dan memberikan inovasi atau ide bagi pemerintah dalam penyelesaian masalah indeks pembangunan manusia (IPM).